
PENERAPAN KONSEP *TRI HITA KARANA* DALAM LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN (Kasus Kabupaten Badung Provinsi Bali)

I Gede Astra Wesnawa

Jurusan Pendidikan Geografi FIS Undiksha, Singaraja-Bali

E-mail: gede_astrawesnawa@yahoo.co.id

Abstract

The research conducted in villages in Badung District due to their existence as safeguarder of adat and culture which indicate the changes in the implementation of Tri Hita Karana (THK) concept. It aimed at (1) identifying forms of change in the implementation of THK concept in village settlements in Badung, Bali Province, (2) identifying factors causing the change, (3) analyzing the process of change, and (4) studying the impact of change. In order to achieve its objectives, the research utilized a survey. The methods of sampling consist of: (1) areal sampling, which was based on landscape unit feature and administrative which were selected proportionally, and (2) subject sampling, which consists of the Head of the family determined through stratified sampling technique based on sosial stratification of triwangsa group and jabawangsa. The analysis was carried out using a qualitative technique supported by quantitative data on change in village settlements which were based upon the THK concept. The research results indicated that four elements have changed. First, forms of change in the implementation of THK concept in the mesoscale village settlements occurred in the element of parhyangan, pawongan, and palemahan in mountainous and plains are relatively the same. The lay out are in the forms of trespassing the circle of holly areas and the placement of temple in vertical orientation. In microscale, the spatial function of biotic component and social culture is transformed into social and economic function for jabawangsa group, whereas triwangsa still maintains the existence of facilities, lay out, and spatial function on abiotic, biotic and social culture component. Second, factors causing the change in the mesoscale village settlement based on THK concept in mountainous and plains were the form of land exploitation, the vegetation availability, income, and the large of land ownership. Meanwhile, in microscale, the limit of land is the only factor. Third, the process of change in mountainous and plains both the mesoscale and microscale were evolutionary and revolutionary. Fourth, the impact of change existed in the mesoscale mountainous and plains were the decrease of preservation area [biotic] and spiritual degradation, whereas in microscale were decrease of space availability for social component [abiotic], donation pattern, and the transformation from primary to secondary and tertiary sector [social culture] on triwangsa and jabawangsa group. The THK concept as manifestation of local wisdom in village settlements is adaptive to changes and advancement of time as indicated by compromising the kahyangan tiga part as the soul of the settlement while the territory as the physical body of the village as well as the residents. Such a harmony will assure preservation of harmonious environment.

Keywords: THK implementation, change, impact, environment, village settlement

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penelitian lingkungan permukiman ini, difokuskan pada telaah mikro dan meso untuk permukiman perdesaan. Pendekatan yang digunakan dalam menghampiri permasalahan adalah pendekatan ekologi (Yunus, 2004; Dyne, 1972; Odum, 1971; Mabogunje, 1970). Pendekatan ekologi dalam studi permukiman memandang permukiman sebagai suatu bentuk ekosistem hasil interaksi, distribusi, dan aktivitas manusia dengan lingkungannya. Tema analisis yang digunakan adalah analisis sistem. Dengan analisis sistem maka dapat dipahami bagaimana komponen lingkungan abiotik, biotik, dan sosial budaya (*culture*) memberikan kejelasan dalam perubahan penerapan konsep Tri Hita Karana (THK) atau tiga penyebab kebahagiaan dalam lingkungan permukiman skala meso dan mikro di daerah perdesaan Kabupaten Badung Bali.

Penataan lingkungan permukiman Kabupaten Badung Bali mendasarkan pada konsep THK. Lokasi *Parhyangan* akan ditempatkan pada areal *utama*, lokasi pelayanan lingkungan ditempatkan pada areal *madya*, sedangkan lokasi untuk kuburan berada pada areal *nista*. Demikian juga penataan ruang pekarangan pura dan perumahan memperhatikan konsep THK (Aryana, 1984). Konsep THK telah menunjukkan berbagai keunggulan dan bersifat universal, relevan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, seperti ditunjukkan Sutawan (2004), Windia (2006), dan Agung (2007) bahwa THK secara implisit mengandung pesan agar dalam pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara arif untuk menjaga kelestariannya, senantiasa bersyukur kehadiran Tuhan dan selalu mengedepankan keharmonisan hubungan antarsesama manusia, sehingga timbulnya konflik dapat diantisipasi. Arus modernisasi membawa pengaruh pada sistem komunikasi masyarakat adat dalam implementasi konsep THK pada lingkungan permukiman. Penelitian permukiman perdesaan berdasarkan konsep THK, akan mengungkap beberapa aspek dari perubahan lingkungan permukiman di daerah perdesaan di Kabupaten Badung Bali. Penelitian ini lebih menekankan pada lingkungan perdesaan yang selama ini belum diidentifikasi secara tuntas.

Perkembangan penduduk memunculkan sejumlah persoalan. Salah satu di antaranya yaitu masalah lingkungan permukiman. Permukiman

berkembang mengiringi laju pertumbuhan penduduk, sehingga tidak mengherankan bila bermunculan permukiman baru. Badung yang memiliki pertumbuhan penduduk relatif tinggi yaitu 1,89% dan terbentuknya keluarga batih mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman. Keterbatasan lahan membawa dampak pada bangunan rumah yang cenderung tidak memperhatikan konsep THK. Untuk itu perlu dikaji, agar dapat ditentukan cara penyelesaian yang tepat sehingga tidak memunculkan persoalan baru, baik dalam hubungannya dengan pemanfaatan material lokal, keberadaan jenis vegetasi untuk menunjang kehidupan adat dan agama, serta lingkungan permukiman berdasarkan konsep THK. Bagaimana permukiman di perdesaan Badung Bali belum diketahui secara pasti.

Gejala peningkatan kegiatan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan di berbagai sektor menuntut pemenuhan kebutuhan lahan dan akan saling berkaitan antar-kegiatan. Hal ini membawa implikasi pada penataan lingkungan. Bagaimana proses terjadinya perubahan lingkungan permukiman perdesaan dalam penerapan konsep THK, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam. Kabupaten Badung mengalami perubahan sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, di antaranya perubahan lingkungan permukiman yang berdasarkan konsep THK. Perubahan yang terjadi tentu diwarnai dengan dampak yang beragam. Bagaimana dampak terhadap implementasi konsep THK dalam lingkungan permukiman perlu dilakukan pengkajian, sehingga ke depan hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan permukiman berdasarkan konsep THK di daerah perdesaan Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disusun permasalahan penelitian sebagai berikut. Kenyataan yang ada di Kabupaten Badung terdapat gejala bahwa terjadi perubahan penerapan konsep THK dalam permukiman perdesaan. Dalam fakta yang lain dapat ditunjukkan bahwa penataan lingkungan permukiman perdesaan pada kenyataan saat ini ada gejala modifikasi (transformasi) konsep normatif yang ada, sehingga dengan demikian, perlu diketahui tentang bentuk-bentuk perubahan, penyebab terjadinya perubahan lingkungan permukiman, proses perubahan lingkungan permukiman, dan dampak perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengungkapkan

bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dari penerapan konsep THK dalam lingkungan permukiman perdesaan Kabupaten Badung, (b) mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penerapan konsep THK dalam lingkungan permukiman perdesaan di Kabupaten Badung, (c) menganalisis proses terjadinya perubahan penerapan konsep THK dalam lingkungan permukiman perdesaan, dan (d) mengkaji dampak lingkungan yang timbul dengan adanya perubahan penerapan konsep THK dalam lingkungan permukiman perdesaan.

1.2 Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei (Effendi dan Singarimbun, 1989). Survei, mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur, dengan cara ini dapat dicakup ciri demografis masyarakat perdesaan dengan sentuhan kekhasan yang dimiliki. Adanya keterbatasan metode survei dalam menggali informasi yang bersifat analisis kualitatif, maka dalam penelitian didukung dengan metode observasi secara langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Penentuan *sampling* meliputi *areal sampling* dan *subjek sampling* dengan teknik *stratified sampling*. Analisis dilakukan dengan teknik analisis kualitatif didukung dengan data kuantitatif terhadap perubahan lingkungan permukiman perdesaan yang berdasarkan pada konsep THK.

Penelitian dilakukan di daerah perdesaan Kabupaten Badung dengan mengambil dua lokasi yaitu lokasi desa perbukitan dan desa landai. Dalam hal ini kelompok populasi dipilih sampel secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman profil daerah tersebut. Sampel yang diambil relatif sebanding dalam hal jumlahnya namun sebarannya merata pada masing-masing lansekap (Kartono, 1996). Dengan cara ini diperoleh sampel sebanyak 5 desa, yaitu 2 desa untuk *landscape* perbukitan yaitu dipilih Desa Petang, Desa Kutuh dan 3 desa untuk lansekap landai dipilih Desa Baha, Desa Buduk, dan Desa Ayunan.

Pengambilan responden penelitian dilakukan secara *stratified proportional random sampling* pada lokasi penelitian di desa landai dan perbukitan. Responden penelitian dalam hal ini dipilih kepala keluarga. Jumlah responden 254 kepala keluarga yang meliputi *triwangsa* dan *jabawangsa*. Data

kualitatif dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagaimana dianjurkan oleh Miles dan Huberman (1987).

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Identifikasi Bentuk-Bentuk Perubahan Penerapan Konsep THK dalam Lingkungan Permukiman Perdesaan

Perubahan penerapan konsep THK dalam lingkungan permukiman perdesaan pada zona *parhyangan* dilihat dari keberadaan fasilitas ruang, tata letak dan fungsi ruang tidak ada perubahan, kecuali radius kawasan suci *pura*, yang direpson dalam bentuk kompromi masyarakat desa. Bentuk kompromi sebagai wujud musyawarah dilakukan karena takutnya masyarakat terhadap adat, keagamaan dan pemerintahan desa (*guru wisesa*).

Pada zona *pawongan*, direpson dalam bentuk adaptasi dengan mengambil ukuran kecil pada aspek tata letak. Sementara pada skala mikro terjadi perubahan pada aspek fungsi ruang ke fungsi ekonomi, yang berakibat pada berubahnya lingkungan permukiman perdesaan. Pada aspek sosial budaya dilakukan pengaturan waktu dalam aktivitas sosial budaya, sehingga PNS/pegawai dapat berpartisipasi. Pergeseran fungsi ke arah modern dari organisasi sosial seperti *sekehe numbeg*, *nandur* (di sektor pertanian) hilang karena berkurangnya jumlah *krama subak* dan melemahnya fungsi *subak* dalam mempertahankan *palemahan* khususnya pada proses perubahan fungsi sawah menjadi bukan sawah.

Pada zona *palemahan*, ruang terbuka untuk sawah/tegalan dipergunakan untuk atribut ekonomi, tanaman padi diganti dengan tanaman bunga-bunga untuk pemenuhan kebutuhan pasar.. Berubahnya lahan sawah menjadi bukan sawah seperti permukiman beserta infrastruktur lainnya menambah komponen pembentuk struktur ruang *palemahan*, perubahan ini berimplikasi pada penurunan keasrian wilayah desa.

Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya, THK sebagai wujud kearifan lokal memiliki makna harmoni dengan lingkungan, sehingga komponen lingkungan dapat berjalan sesuai fungsi dalam merespon perubahan dan perkembangan zaman. THK adaptif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga tidak terjadi konflik yang bersumber dari perubahan penerapan THK. Hal

ini berarti THK bisa berlaku secara kontekstual dan universal dalam lingkungan permukiman perdesaan.

2.2 Penyebab Perubahan Lingkungan Permukiman Perdesaan Berdasarkan Konsep THK

Faktor penyebab perubahan lingkungan permukiman perdesaan berdasarkan konsep THK dalam skala meso, meliputi: komponen abiotik yaitu wujud penggunaan lahan, lansekap, tanah, tata air, dan iklim. Komponen biotik meliputi: komponen tumbuhan, hewan dan manusia. Komponen sosial budaya meliputi: inovasi teknologi, komersialisasi pertanian dan diversifikasi ekonomi, sistem kelembagaan *desa adat* dan kearifan lokal.

Konsep THK sebagai konsep normatif tetap adaptif dalam mengakomodasi perubahan. Kuatnya pengaruh modernisasi hanya merubah fungsi sosial ekonomi, sedangkan kehidupan keagamaan dan struktur spasial relatif tetap. Kuatnya pertahanan ini disebabkan oleh kuatnya kepercayaan masyarakat pada THK. Hal ini tercermin pada upacara keagamaan dengan memanfaatkan air pada sumber mata air. Doa sakral melestarikan tumbuhan dan hewan, bila dilanjutkan dengan program aksi maka tumbuhan dan hewan dapat dipertahankan keberlanjutannya.

Faktor penyebab perubahan skala mikro, meliputi: keberadaan vegetasi, pendapatan keluarga, dan luas pemilikan lahan. THK dalam lingkungan permukiman, tampak bahwa keterbatasan lahan dan kemampuan ekonomi akan mempengaruhi tata ruang untuk *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Dalam aspek sosial budaya, mata pencaharian kepala keluarga menunjukkan pergeseran pekerjaan kepala keluarga ke sektor non-pertanian. Hal ini mengindikasikan struktur ekonomi sedang mengalami transformasi dari struktur primer ke struktur sekunder dan tersier. Dalam konteks kearifan lokal, perubahan ini memiliki makna sosial yang terwujud dalam bentuk aktivitas ekonomi, yang bertujuan untuk menjamin keharmonisan dan perkembangan sumberdaya manusia dalam rangka konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.

2.3 Proses Perubahan Penerapan Konsep THK dalam Lingkungan Permukiman Perdesaan

a). Perubahan skala meso dibedakan atas perubahan secara evolutif dan revolutif

Secara evolutif proses perubahan dibedakan atas: (a) perubahan dari dalam meliputi:

pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya proses perubahan fungsi lahan sawah menjadi permukiman. *Awig-awig* (aturan adat) yang mengatur masalah lingkungan dilengkapi dengan sanksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang berhubungan dengan tempat suci, batas pekarangan, popohonan dan ternak dan (b) perubahan dari luar: proses perubahan di daerah perbukitan lebih rendah dibandingkan dengan daerah landai (dataran) dilihat dari proses perubahan karena lembaga adat dan kebudayaan luar. Kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan, maka kebudayaan harus dilestarikan, pelestarian kebudayaan terkait dengan pelestarian THK sebagai pilar kebudayaan Bali.

Secara revolutif proses perubahan meliputi: (a) perubahan dari dalam meliputi: orientasi ekonomi di daerah dataran (landai) lebih tinggi dibandingkan dengan perbukitan, hal ini disebabkan karena daerah landai memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi. Demikian juga estetika modern, daerah landai memiliki aksesibilitas yang lebih dekat dengan perkotaan cenderung memperoleh imbas dari modernisasi dan (b) perubahan dari luar meliputi lembaga adat dan kebudayaan asing. Lembaga adat di daerah perbukitan lebih besar mempengaruhi proses perubahan dibandingkan dengan landai.

b). Perubahan Skala Mikro Dibedakan Atas Perubahan Secara Evolutif dan Revolutif

Secara evolutif proses perubahan skala mikro meliputi: (a) perubahan dari dalam: bertambahnya anggota keluarga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar dan eksploitasi sumberdaya, yang cenderung berfikir pragmatis dalam pemanfaatan lingkungan permukiman perdesaan. Hal tersebut secara perlahan akan melupakan konsep THK sebagai pedoman dalam melakoni kehidupan. Demikian juga dengan faktor lain yang lebih memuaskan dan keinginan lebih baik dengan adanya teknologi baru menyebabkan terjadinya proses perubahan dalam permukiman tradisional Bali, seperti dibutuhkan adanya *garase* dan pintu masuk kendaraan. Teknologi baru mengakibatkan *kori* (pintu masuk rumah pekarangan) disesuaikan dengan aksesibilitas

terhadap jalan dan (b) perubahan dari luar meliputi pendidikan anak dan kebudayaan asing. Kecenderungan yang ada adalah kurangnya tenaga yang mau mengikuti pendidikan, sehingga tenaga terampil di bidang arsitektur tradisional semakin jarang adanya. Hal ini menghambat proses pengembangan arsitektur tradisional berbasis konsep THK.

Secara revolutif: (a) perubahan dari dalam meliputi kehidupan ekonomi, peningkatan pemanfaatan ruang dan kebutuhan privasi dari ruang. Dalam konteks lingkungan permukiman berdasarkan THK, keberadaan bahan-bahan lokal yang semakin langka, tenaga ahli yang langka, proses penyelesaian bangunan yang relatif lama cenderung beralih ke bentuk bangunan modern. Peningkatan pemanfaatan ruang, pada permukiman di sepanjang jalur jalan memberi ruang usaha untuk mewadahi kebutuhan hunian dan nafkah, sehingga ruang memiliki fungsi ganda, dan (b) perubahan dari luar meliputi kelembagaan adat dan *awig-awig*. Untuk *awig-awig* daerah perbukitan lebih kuat dibandingkan dengan daerah landai. Hal ini disebabkan karena daerah perbukitan memiliki keterikatan adat yang kuat, di samping komunitas perbukitan hidup dalam kelompok-kelompok permukiman.

THK sebagai wujud kearifan lokal dan pelestarian lingkungan memberi kontribusi pada proses perubahan yang berlangsung secara evolutif dan revolutif. Perubahan tersebut direspon dengan kemampuan adaptasi, yang dilandasi oleh adanya keharmonisan hubungan antarkomponen lingkungan, yang bertujuan menjamin pelestarian fungsi lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Proses perubahan yang berlangsung dalam lingkungan permukiman skala meso dan mikro berbasis pada kearifan lokal ini masih relevan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam perubahan dan perkembangan zaman.

2.4 Dampak Perubahan Penerapan THK dalam Lingkungan Permukiman Perdesaan

Dalam skala meso, dampak perubahan lingkungan permukiman terhadap komponen abiotik pada ruang *utama* di daerah perbukitan tidak tampak ada perubahan dalam pemanfaatan ruang *utama* sebagai lahan untuk *parhyangan* desa. Sementara daerah landai tetap pada arah utara namun di bagian hulunya dijumpai ada permukiman. Bila dikaitkan

dengan konsep kesucian, maka harus mengikuti *bhisama*. Namun, dengan keterbatasan lahan dibuatkan pembatas berupa jalan atau saluran irigasi sebagai bentuk kompromi oleh masyarakat adat. Pada ruang *madya* di perbukitan permukiman umumnya mengelompok, kini menyebar mengikuti jalan. Bangunan di pinggir jalan memiliki fungsi ganda, tanpa mengindahkan konsep normatif yang ada. Menjalarnya permukiman ke luar desa, menyebabkan batas ruang *nista* yang biasanya digunakan untuk upacara bersih desa menjadi kabur.

Dampak perubahan lingkungan permukiman terhadap komponen biotik pada ruang *utama*, berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung. Pada daerah perbukitan dan landai pemanfaatan ruang *utama* di antaranya untuk permukiman. Pada ruang *madya* dipelihara tanaman yang memiliki fungsi penghias ruang. Pada ruang *nista*, mulai dimanfaatkan dengan aneka ragam tanaman bunga-bunga, karena dianggap lebih cepat mendatangkan hasil dibandingkan dengan padi.

Sementara itu, dampak perubahan lingkungan permukiman terhadap komponen sosial budaya pada ruang *utama*, ruang *madya* dan ruang *nista*. Pada ruang *utama*, yang dimanfaatkan sebagai tempat suci muncul pencemaran spiritual karena pelanggaran radius kawasan suci. Pada ruang *madya*, secara tradisional lahan desa termasuk lahan permukiman yang biasanya dijadikan tempat aktivitas sosial budaya mengalami perubahan. Pada ruang *nista* dampak komponen sosial budaya meliputi: perubahan struktur sosial, perubahan interaksional, gotong-royong, dan perubahan pola sumbangan dalam sosial budaya.

Dalam skala mikro, dampak perubahan lingkungan permukiman berpengaruh terhadap komponen abiotik menurut ketentuan normatif THK. Dampak perubahan meliputi tata letak bangunan pemujaan menuju orientasi vertikal, hal ini berkembang mengingat adanya konsepsi *menek-tuwun* (hulu-hilir). Di samping adanya kemampuan ekonomi penghuni yang menunjukkan gengsi dan status sosialnya. Pada ruang *madya* diperuntukkan bagi bangunan rumah. Pertambahan jumlah anggota keluarga memerlukan tempat tinggal yang lebih banyak, sehingga lahan kosong ditempatkan bangunan hunian. Dampaknya berupa lokasi bangunan tidak sesuai dengan ruang tradisional dan ukuran *asta kosala kosali* tidak dijadikan pertimbangan.

Dampak perubahan lingkungan permukiman terhadap komponen biotik: (a) ruang *utama* di daerah perbukitan dan landai pemanfaatan ruang lebih banyak untuk bangunan sebagai tempat tinggal maupun untuk usaha ekonomi keluarga, (b) ruang *madya*, keterbatasan lahan mengakibatkan tidak ada ruang untuk tanaman maupun hewan. Kecenderungan yang ada adalah perubahan tanam yang ditanam di ruang *madya* berupa tanaman hias, dan (c) ruang *nista* di daerah perbukitan masih diprioritaskan untuk tanaman keras, sementara di daerah landai ruang *nista*nya difungsikan untuk bangunan rumah maupun kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga keberadaan tanaman semakin berkurang. Hal ini berdampak pada kebutuhan akan bahan bangunan dari lingkungan sekitar tidak ditemukan lagi.

Dampak perubahan lingkungan permukiman terhadap komponen sosial budaya: (a) ruang *utama* tidak menunjukkan adanya perubahan, hal ini dapat dipahami karena penghuni menerima sebagai warisan leluhur yang sudah sesuai dengan ketentuan maupun petunjuk *undagi*, (b) ruang *madya*, penghuni lebih berani melakukan modifikasi untuk komponen sosial dengan memanfaatkan bangunan lain dengan fungsi berbeda, dan (c) ruang *nista*, dampak yang timbul adalah ketersediaan komponen ruang untuk sosial budaya semakin berkurang.

Dampak perubahan penerapan konsep THK dalam lingkungan permukiman perdesaan direpson secara adaptif oleh kearifan lokal dalam wujud THK. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan lahan maka pembangunan tempat pemujaan berubah dari orientasi horisontal menuju ke vertikal. Dampak perubahan ini masih menunjukkan harmoni dalam hubungan manusia dengan Tuhan, karena arah atas sebagai arah utama sebagai tempat unsur *parhyangan*.

3. Simpulan

Bentuk-bentuk perubahan penerapan konsep THK pada lingkungan permukiman perdesaan dalam skala meso meliputi unsur *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* desa. Tata ruang perdesaan tidak tampak batas yang jelas tentang ruang untuk *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*, ruang untuk *parhyangan* dimanfaatkan untuk bangunan perumahan, *pawongan* juga ditemukan adanya *parhyangan*, demikian juga ruang *palemahan* dimanfaatkan untuk bangunan atau infrastruktur

lainnya, hal ini membawa implikasi pada pelaksanaan kegiatan upacara adat, keagamaan, dan sosial. Skala mikro, tata letak *sanggah* ditempatkan di lantai atas, fungsi bangunan rumah mengalami perubahan, *tebe* keberadaannya mulai berkurang. Temuan penelitian adalah adanya orientasi tata letak bangunan pemujaan menuju orientasi vertikal, hal ini didukung oleh adanya konsepsi *menek-tuwun*, kemampuan ekonomi dan gengsi penghuninya.

Penyebab perubahan, unsur lansekap berupa ketinggian tempat dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tempat akan berpengaruh pada variasi penggunaan lahan untuk bangunan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Lansekap yang berbeda berpengaruh pula pada aktivitas penduduk. Keterbatasan lahan menyebabkan keberadaan tumbuh-tumbuhan mulai berkurang, untuk memenuhi kebutuhan akan bunga-bunga keperluan *yadnya* rumah tangga memperolehnya dengan cara membeli. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh nyata terhadap perubahan penerapan THK dalam lingkungan permukiman perdesaan adalah luas pemilikan lahan, keberadaan tumbuh-tumbuhan, dan pendapatan. Dalam aspek sosial budaya, mata pencaharian kepala keluarga menunjukkan pergeseran pekerjaan kepala keluarga ke sektor non-pertanian. Temuan penelitian adalah struktur ekonomi sedang mengalami transformasi dari struktur primer ke struktur sekunder dan tersier.

Proses perubahan secara evolutif skala meso dari dalam meliputi penambahan penduduk, perubahan struktur masyarakat, faktor baru yang lebih memuaskan, keinginan yang lebih baik dari sebelumnya dan *awig-awig*. Skala mikro perubahan dari dalam meliputi bertambahnya anggota keluarga, perubahan struktur keluarga, faktor lain yang lebih memuaskan dan adanya keinginan lebih baik. Tidak tampak perbedaan yang menjolok antara perbukitan dan landai. Bertambahnya anggota keluarga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar dan eksploitasi sumberdaya, yang cenderung berfikir pragmatis dalam pemanfaatan lingkungan permukiman perdesaan. Hal tersebut secara perlahan akan melupakan ketentuan normatif THK yang selama ini dijadikan pedoman dalam melakoni kehidupan.

Secara revolutif proses perubahan dari dalam meliputi orientasi ekonomi dan estetika modern. Orientasi ekonomi di daerah landai lebih tinggi dibandingkan dengan perbukitan. Hal ini disebabkan karena daerah landai memiliki aksesibilitas yang

lebih tinggi. Demikian juga estetika modern, daerah landai memiliki aksesibilitas yang lebih dekat dengan perkotaan cenderung memperoleh imbas dari modernisasi

Dampak perubahan. Pada ruang *nista*, pemanfaatan untuk permukiman berdampak pada berkurangnya ruang untuk memproduksi bahan pangan. Menjalarnya permukiman ke luar desa menyebabkan batas ruang *nista* menjadi kabur. Temuan penelitian adalah adanya wujud kompromi

dalam pemanfaatan ruang, baik pada ruang utama, ruang madya, dan ruang *nista*.

Dampak perubahan lingkungan permukiman terhadap komponen biotik berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung di ruang *utama*. Pada ruang *madya* dan *nista*, dampaknya berupa lokasi bangunan tidak sesuai dengan ruang tradisional dan ukuran berdasarkan *asta kosala kosali* tidak dijadikan pertimbangan, sehingga bangunan rumah terkesan semrawut.

Daftar Pustaka

- Agung, Anak Agung Gede 2007. Bali Endangered Paradise: Tri Hita Karana and the Conservation of the Island, *Dissertation*. Leiden University: Belanda, (online) available <http://indo-emirates.org/portal> (diakses 6 Agustus 2007).
- Aryana, Anak Agung Gede. 1984. Landasan Konseptual Arsitektur Tradisional Bali. *Dalam Majalah Widya Pustaka, Tahun II Nomor 3 Desember 1984*, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Dyne, Van, George M..1972. *The Ecosystem Concept In Natural Resource Management*. Academic Press, New York and London.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju, Bandung.
- Mabogunje, A.L.. 1970. "System Approach to a Theory of Rural Urban Migration" in: *Geography Analysis* 2. 1-18.
- Miles, Mathew, Huberman A, Michael. 1992. *Analisis data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.
- Odum, Eugene, P. 1971. *Fundamentals Of Ecology* diterjemahkan oleh Penerjemah Tjahjono Samingan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutawan, Nyoman. 2004. *Tri Hita Karana and Subak In Search for Alternative Concepst of Sustainable Irrigated Rice Culture*. Universitas Udayana, Denpasar.
- Windia, Wayan. 2006. *Transformasi Sistem Irigasi Subak yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana*. Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Yunus, Hadi Sabari. 2004. "Pendekatan Utama Geografi Acuan Khusus pada Pendekatan Keruangan, Ekologi dan Kompleks Wilayah". Makalah disampaikan dalam *Studium General Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tanggal 24 Maret 2004*, (Tanpa Penerbit), Yogyakarta.